

Perlawanan Pers Islam pada Masa Orde Baru

Abdul Firman Ashaf

ABSTRACT

This study discussed Republika—a widely circulated national newspaper in Indonesia—as ICMI's articulation medium. The main question lies here is how did Republika conducted its social practices role in the New Order Era in order to frame Islam and its state relation? Employing descriptive qualitative method, this research analyzed some news event dated back on July, 26th, 1996. The research aimed to understand ICMI political journalism reflected by Republika daily news, and relate it to the journalist respons and sociopolitical context during New Order Era. It was found that Republika was an actor resulted from sociopolitical struggles during New Order Era. At the end of 90's, Republika was really aware of the objective conditions happened during New Order era. Republika was also understanding such changes that happened within elites and society, and then placed itself as the actor of change by conducting a kind of resistance through its respons and report. As an alternative discourse, this resistance was appeared on Republika's report concerning the involvement of Partai Rakyat Demokratik (PRD—Democratic People Party) in July, 27th, 1996 chaos.

Kata kunci: wacana media, resistensi, pers Islami

1. Pendahuluan

Pagi, pukul 05.30, pada 27 Juli 1996, terjadi serangan terhadap kantor DPP PDI. Kejadian tersebut menandai mulai digunakannya taktik-taktik keras pemerintah seperti yang pernah diperlakukan pada awal Orde Baru. Walaupun kalangan demokrat Indonesia sempat bingung, namun insiden 27 Juli menandai titik awal kejatuhan Soeharto¹.

Perebutan kantor DPP PDI dilakukan melalui dua kali serangan. Masing-masing serangan terdiri dari 800 pendukung Soerjadi, pemimpin yang menyerang dan menghujani kantor DPP PDI dengan batu, kemudian memukul siapa saja yang bertahan di kantor tersebut dengan balok-balok besi. Pendukung PDI yang bertahan di dalam kantor DPP PDI umumnya mengalami cedera serius.

Dua minggu sebelum penyerangan, para pendukung Soerjadi dilatih terlebih dahulu di sebuah kamp militer, di luar Jakarta oleh penasihat militer dari kesatuan Kopassus, di bawah arahan Mayjen Prabowo Subianto, menantu Soeharto. Yang paling banyak di antara pendukung Soerjadi adalah kader-kader Pemuda Pancasila². Setelah setengah jam penyerangan berlangsung, pasukan Soerjadi mundur dan beberapa di antaranya luka parah. Dalam sebuah diskusi tentang kekerasan beberapa minggu sesudahnya, ahli-ahli strategi pemerintah mengakui bahwa mereka salah mengestimasi kesetiaan para pendukung Mega. Para ahli strategi pemerintah mengakui kesalahan kalkulasi mereka, terutama karena tidak mampu menjaga kerjasamanya dengan aparat intelejen. Para penasihat militer yang terlibat dalam serangan itu enggan melibatkan aparat intelejen ke dalam

rencana mereka, karena tahu bahwa umumnya aparat intelejen tidak ingin ikut-ikutan dengan gerakan anti-Mega.

Setelah serangan pertama gagal, serangan kedua dimulai dua jam berikutnya, yaitu pukul 07.30 pagi. Pada serangan kedua ini Soerjadi didukung oleh anggota Kopassus (namun tidak berseragam) di bawah komando Mayjen Prabowo Subianto. Serangan kedua ini sukses, dan mencapai target yang diinginkan. Kantor DPP PDI dapat direbut, banyak pendukung Mega ditangkap. Laporan awal tentang serangan ini menyebutkan sekitar 40 orang tewas dalam serangan kedua ini. Tetapi, Komnas HAM dalam laporannya perihal insiden tersebut hanya bisa memastikan kematian lima orang. Komnas HAM juga mengakui bahwa banyak pendukung Mega yang hilang. Belum bisa dipastikan apakah korban hilang tersebut sudah meninggal, atau bersembunyi lantas tak ditemukan jejaknya.

Setelah merebut kantor DPP PDI, aparat keamanan menutup jalan-jalan di sekitar kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Beberapa jam kemudian, para pendukung Mega berusaha berkali-kali merebut kembali kantor DPP PDI, namun tidak berhasil. Akhirnya, banyak demonstran yang menyebar ke dalam kota, diikuti oleh kaum miskin kota Jakarta. Sebagian kelompok demonstran yang semakin membesar itu menyerang dan membakar kantor-kantor pemerintah serta gedung-gedung kroni Soeharto³³. Menurut laporan Hefner (2001:310), setelah kejadian kerusuhan tersebut, aktivis PDI menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan itu adalah orang-orang Prabowo.

Lalu siapa pelaku kerusuhan itu sebenarnya? Pemerintah tanpa diduga melayangkan tuduhan kasus 27 Juli tersebut pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD dikenal sebagai organisasi kiri baru. Menurut Hefner (2001:311), PRD adalah korban kambing hitam yang cukup mendapat perhatian. PRD memproklamirkan dirinya sebagai partai hanya beberapa hari sebelum kejadian penyerangan terhadap kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli tersebut. Walaupun PRD mendukung demokrasi multipartai, namun analisis PRD tentang krisis politik di Indonesia

menempatkan tanggung jawab persoalan pada kebijakan-kebijakan Orde Baru yang memihak kapitalisme global dan kelas pemilik modal. Kosakata politik PRD mengikuti model kiri Marxian, meski dalam bentuk yang belum tertata rapi. Dan tidak biasanya, pendirian PRD bertepatan dengan penyerangan kantor PDI. Dalam pandangan sejumlah pengamat, fakta itulah yang dijadikan alasan pemerintah untuk mengambil kasus 27 Juli pada PRD⁴. Hari-hari berikutnya setelah kasus 27 Juli, orang-orang pemerintah menyebut PRD sebagai “dalang” kasus 27 Juli dan PKI sebagai tuan PRD.

Peristiwa ini, tentu saja, melibatkan respon yang sangat luas dari kalangan Islam. Bagaimana sikap ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)? Pertanyaan tersebut penting apabila dikaitkan dengan bagaimana medium artikulasi ICMI, *Republika*, menyuarakan kecenderungan dalam ICMI. Mengingat kelompok-kelompok dalam ICMI memiliki tendensi yang kuat sebagai representasi ke arah kutub mana bandul *Republika* mengayun: hegemoni atau resistensi. Dengan asumsi bahwa media bukanlah sekadar variabel terpengaruh, namun juga aktif, dinamis, dan responsif, jelas konteks politik media *Republika* harus ditempatkan dalam konteks peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Orde Baru 1990-an.

Tulisan ini bermaksud melukiskan politik jurnalisme ICMI sebagaimana tecermin dalam pemberitaan harian *Republika*, dalam kaitannya dengan respons jurnalis dan konteks sosial-politik pada masa Orde Baru. Secara rinci, tulisan ini ingin menjawab sejumlah persoalan, yaitu: (a) Bagaimana praktek penggunaan bahasa dalam pemberitaan harian *Republika* berkaitan dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) seputar peristiwa 27 Juli 1996 (b) Bagaimana respons para jurnalis *Republika*? (c) Konteks sosial politik apa yang melahirkan pola teks dan respon tersebut?

2. Tinjauan Pustaka

Politik Jurnalisme mengacu pada pandangan konstruktivis bahwa sesungguhnya media bersifat aktif dan kreatif dalam merespons realitas. Dengan kata lain, dalam pengertian “politik jurnalisme

pers,” pers tidak semata sebagai objek yang pasif, tetapi juga sebagai pelaku yang aktif dan terlibat – lewat pemberitaan – dalam realitas politik. Dua kategori yang dikembangkan untuk memahami politik jurnalisme pers adalah hegemoni dan resistensi. Demi kepentingan kajian ini, penulis membangun terminologi khusus dengan mengadopsi dan memformulasi model yang digunakan oleh Fairclough dan van Dijk (Eriyanto, 2001: Bab XI dan X), yaitu: *historis*, *teks*, dan *respons*. Terminologi ‘historis’ menyandarkan diri pada pemahaman *sociocultural practices* yang dikemukakan Fairclough, sekaligus juga, selain menyadari bahwa peristiwa yang dikaji telah berlalu, juga mengabsorbsi syarat utama pengkajian wacana media yang menekankan unsur sejarah. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara implisit model analisis sosial yang dikembangkan oleh van Dijk cenderung mengarah ke determinasi, yang mengasumsikan bahwa produksi wacana yang berkembang dalam masyarakat, karena mekanisme praktik kekuasaan (*power*) dan ketidaksetaraan akses (*acces*), serta merta akan menghasilkan wacana yang dominan.

Fairclough, dengan pandangan ‘*sociocultural practices*’-nya, terasa lebih longgar karena mengisyaratkan adanya proses transaksi dan pasang-surut yang dinamis di antara pelaku-pelaku sosial. Selanjutnya ‘*respons*’ lebih dekat pada pemahaman konsep “kognisi sosial” yang dikemukakan van Dijk. Mengapa? Karena, apabila Fairclough dengan ‘*discourse practices*’ memiliki tendensi untuk menangkap *setting* alamiah pelaku, dengan melihat proses-proses rutinitas media dan relasi-relasi di ruang redaksi, maka ‘*respons*’ dengan mengikuti pandangan tentang kognisi sosial, didefinisikan lebih longgar berhubung dibatasi untuk memahami objek penelitian dengan memanfaatkan respon para jurnalis melalui produksi teks yang mereka hasilkan berupa opini di media massa, berikut sumber-sumber kepustakaan lain. Hambatan untuk menangkap *setting* alamiah pada *newsroom* juga berkaitan dengan telah berlalunya peristiwa tersebut ketika penelitian ini dilakukan. Berkaitan dengan teks, apabila dalam pemahaman Fairclough dan van Dijk, *texts* dipahami lewat

analisis *critical linguistik*, maka ‘teks’ dalam kajian ini selain mengeksplorasi dimensi linguistiknya, juga meletakkannya dalam sebuah ‘deskripsi isi historis’ yang bertujuan melihat aspek-aspek yang bermakna pada teks, baik parsial maupun keseluruhan, dalam hubungannya dengan respons dan konteks.

3. Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari isi (*content*) pemberitaan harian *Republika*, dan penelusuran kepustakaan. Pemberitaan dianalisis dengan analisis isi kualitatif lewat “deskripsi-historis”⁵ isi surat kabar *Republika*. Pengertian “deskripsi-historis” di sini mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan memaparkan elemen-elemen isi pemberitaan yang signifikan, baik secara parsial maupun keseluruhan, dalam hubungannya dengan konteks historis tertentu. Metode ini bermanfaat untuk melihat sikap dan dinamika surat kabar yang tecermin dalam pemberitaannya tentang peristiwa 27 Juli 1996

4. Pembahasan

4.1 ICMI, “Republika,” Kelas Menengah dan Demokratisasi

Sejak 1966, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan Orde Baru, sebuah pemerintahan militer yang dipimpin Presiden Soeharto. Orde Baru segera berkuasa setelah peristiwa 1 Oktober 1965, yang berkaitan dengan pembunuhan enam jenderal senior dalam suatu konspirasi yang rupanya diorganisasikan oleh perwira-perwira muda pengawal Presiden Soekarno, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Partai Komunis Indonesia. Mayor Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai komandan pasukan strategis di Jakarta, lantas dengan cepat mengerahkan kekuatan-kekuatan anti-komunis di ibukota dan seluruh tanah air. Partai Komunis Indonesia selanjutnya dilarang, ratusan ribu anggota dan pendukungnya ditangkap atau dibunuh. Soekarno, yang dianggap melindungi komunis, sekalipun tidak terlibat dalam

pembunuhan tersebut, diturunkan dari kekuasaannya oleh kelompok penguasa baru berbasiskan militer yang dipimpin Soeharto.

Inilah babak baru Indonesia modern. Sejak saat itu, di Indonesia muncul kecurigaan yang sangat mendalam terhadap apa saja yang berbau komunis. Sejak tahun 60-an hingga pertengahan tahun 80-an, anasir komunis, baik dalam realitas atau pun dalam bayangan, tidaklah sendirian. Apabila komunis dilabeli dengan istilah ekstrem kiri, maka kelompok Islam militan diberi label sebagai ekstrem kanan. Sekalipun kelompok Islam tidak mendapat perlakuan sekeji yang diberikan terhadap kelompok komunis, namun tetap saja mereka didiskriminasi, dibatasi ruang geraknya, dan ditahan atas tuduhan yang kadang-kadang tak beralasan, bahkan dipenjara dalam waktu yang sangat lama.

Namun, masa-masa penuh gejolak dan kecurigaan itu pada akhirnya berangsur-angsur memudar. Akhir 80-an, bagi banyak kalangan Islam, menjadi era baru relasi Islam dan negara. Tonggak semua itu adalah lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI). Organisasi para cendekiawan Muslim ini dalam perjalannya menyisakan banyak kontroversi dan kecurigaan sekaligus rasa syukur dan optimisme. Seorang wartawan, sekaligus aktivis Islam, melaporkan bagaimana suasana terbentuknya ICMI di Universitas Brawijaya, Malang:

“Malang, 7 Desember 1990, pukul 20.15 WIB. Suara beduk bertalu-talu di aula *student centre* Universitas Brawijaya, mengiringi terbentuknya *Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia* (ICMI). Sesekali terdengar pekik *Allahu Akbar*, menyambut detik-detik yang bersejarah. Rasa haru, gembira, dan syukur bercampur di sanubari cendekiawan Muslim yang hadir dan menyaksikan peristiwa yang sangat penting di penghujung tahun 1990 itu. Ada yang bersalaman, ada yang saling berpelukan, ada pula yang langsung sujud syukur di tempat perhelatan” (Anwar, 1992:2)

Pertanyaannya, apakah kelahiran ICMI begitu menyimpan harapan dan optimisme sebagaimana ilustrasi di atas? Terdapat varian jawaban atas pertanyaan tersebut. Salah satu argumen yang masuk akal untuk menjelaskan fenomena relasi Is-

lam dan negara pada masa Orde Baru adalah yang dikemukakan Robert W. Hefner.

Menurut Hefner⁶, selama Orde Baru, sejumlah besar kaum Muslim sinkretik (abangan) telah menjadi santri. Dikotomi santri abangan ini berasal dari Geertz, sebagai hasil penelitiannya di Pare, Kediri⁷. Dikotomi santri-abangan merupakan alat konseptual penting dalam menganalisis politik Indonesia sejak 1950-an, ketika pertama kali dihubungkan dengan dukungan dari partai-partai politik. Meskipun penduduk Indonesia hampir 90 % adalah Muslim, partai-partai Islam diakui hanya menerima 40 % suara dalam pemilihan parlemen pada Pemilu 1955. Suara abangan sangat menentukan kemenangan partai nasionalis (22,3%) dan komunis (16,4%), dan terhadap persentase lebih kecil yang diterima banyak partai-partai non agama lainnya. Santrinisasi skala luas (Islamisasi abangan yang secara formal sudah Muslim) terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan dengan demikian mengindikasikan pola kultur dan kepentingan politik massa pada tahun 1990-an, yang secara mencolok berbeda dengan tahun 1950-an. Ia juga dapat menandakan suara mayoritas potensial bagi partai Islam yang diakui atau partai masa depan Indonesia yang demokratis.

Selain itu, Hefner percaya bahwa banyak santri baru itu adalah anggota kelas menengah yang sedang tumbuh, yang menerima pendidikan modern, bekerja sebagai karyawan di kantor-kantor, kalangan profesional, baik di sektor pemerintah ataupun swasta. Budaya keagamaan mereka sangat toleran, baik terhadap non-Muslim maupun rekan mereka sesama Muslim dari berbagai aliran. Juru bicara terpenting dari kelas menengah Muslim baru adalah Nurcholish Madjid, yang sebagian besar hidupnya mengembangkan penafsiran Islam yang lebih pluralistik, serta mencoba belajar dari pandangan bermacam-macam kaum Muslim yang berbeda serta dari penganut agama lain, bahkan dari kalangan sekularis.

Berkaitan dengan kepentingan politik Soeharto, Hefner meyakini bahwa adopsi Soeharto atas bagian substansial agenda aktivis Muslim, termasuk dukungannya terhadap pembentukan ICMI, sangat dipengaruhi oleh pengakuannya atas

perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, khususnya Islamisasi kelas menengah kota yang mendalam. Pembentukan ICMI adalah tonggak sejarah penting dalam berjuang merebut dan menunjukkan kesetiaan moral kelas menengah kota. Dengan demikian, Hefner lalu berkesimpulan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan untuk menganalisis politik dan agama di Indonesia patut untuk dikoreksi. Karena selama ini terdapat identifikasi bahwa pemerintah merupakan benteng ‘abanganisme’ yang tidak begitu menyukai Islam.

Dengan demikian, pandangan ini berada pada jalur yang berbeda dengan asumsi yang memandang ICMI dari sisi politik sebagai bagian dari kepentingan Soeharto. Namun demikian, kedua posisi tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ICMI merupakan proses kompleks yang terlalu sederhana apabila dianggap merupakan mata rantai dari kasus tunggal saja. Keadaan ini menunjukkan bahwa kelahiran ICMI merupakan hal yang sedemikian penting untuk diabaikan ketika ingin menganalisis dinamika Orde Baru, sekaligus juga relasinya dengan Islam. Sekalipun dalam kajian ini tidak diulas lebih jauh mana dari kedua posisi tersebut yang benar, juga tidak akan diusahakan sebuah sintesis di antara keduanya, namun akan diupayakan suatu formulasi iihwal betapa pentingnya ICMI dalam menganalisis politik kontemporer Orde Baru. Formulasi tersebut diajukan oleh Douglas Ramage. Menurut Ramage (2002:138-140), terdapat empat alasan untuk menunjukkan arti penting ICMI dalam studi kontemporer Orde Baru, yaitu:

Pertama, anggota-anggota ICMI memandang organisasi mereka ‘menyuarkan’ Islam. Ini berkaitan dengan Islam yang awalnya mengalami marjinalisasi dan tidak berpartisipasi secara maksimal. Dengan adanya ICMI, maka muncul suara baru dari sebuah kelompok baru. Kelompok baru ini selain merujuk hubungannya dengan kelompok di luar Islam, juga merujuk pada keadaan bahwa sebelumnya wacana Islam dimonopoli oleh organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, atau beberapa tokoh Muslim, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Dengan adanya ICMI, Islam tidak lagi

dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu.

Kedua, ICMI merupakan bentuk konkret dari perubahan sikap Soeharto dan pendekatannya terhadap Islam. Akomodasi ini didasari oleh alasan sbb: (akibat) penerimaan asas tunggal Pancasila oleh Islam, Soeharto memerlukan dukungan Islam untuk mengganti berkurangnya dukungan militer, juga dimensi personal yang berkaitan dengan peningkatan ketaatan religius Soeharto atas Islam.

Ketiga, pendirian ICMI dan pensponsorannya oleh pemerintah dikarenakan Orde Baru, terutama Soeharto, merasa ‘menang’ atas Islam politik. Setelah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal, tidak ada lagi masalah psikologis dan politis tentang upaya mendirikan negara Islam. Ini merupakan kemenangan bagi Soeharto. Oleh karena itu, berhubung negara tidak lagi merasa terancam, maka wajarlah bila Islam harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk dalam pendirian ICMI. Penerimaan asas tunggal Pancasila setidaknya dihasilkan oleh tiga perkembangan, yaitu: meluasnya akses kepada pendidikan tinggi, terutama luar negeri, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih pluralistik. Pancasila sebagai asas tunggal pada akhirnya diyakini tidak akan menjadi agama sipil atau mencoba melakukan sekularisasi negara. Umat Islam menjadi lebih mantap dan penuh percaya diri dan tidak mempermendas keabsahan Pancasila bagi masyarakat Muslim. Selain itu, terdapat keputusan-keputusan politis eksplisit untuk menghentikan oposisi terhadap Pancasila atau pembahasan tentang Piagam Jakarta. Selain itu, ada pandangan yang berkembang bahwa masalah bangsa Indonesia bukanlah terletak pada Pancasila, melainkan pada kebijakan-kebijakan dan program-program konkret tertentu yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, ketimbang melakukan usaha sia-sia dengan menyerang Pancasila (usaha yang tidak akan menang), maka lebih baik berpartisipasi dari dalam dan memengaruhi kebijakan.

Keempat, ICMI menjadi penting karena upayanya untuk berbicara kepada (dan untuk) umat Islam kota yang berpendidikan dan semakin berubah menjadi kelas menengah baru yang

diuntungkan oleh pembangunan.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah benang merah bahwa berdirinya ICMI merupakan jalinan beragam dinamika yang mencakup: penerimaan asas tunggal Pancasila oleh umat Islam, ketegangan hubungan Soeharto dengan militer, perpecahan dalam gerakan Islam terkait kedekatan Soeharto dengan Islam, persepsi non Muslim dan Muslim sekuler bahwa Indonesia sedang mengalami islamisasi, dan tumbuhnya kelas menengah Muslim yang terpelajar.

Berdasarkan konteks sedemikian, ICMI pun menelorkan medium artikulasinya, yaitu *Republika*. *Republika* berdiri pada 4 Januari 1993. Sebelumnya, pada awal Desember 1993, telah diumumkan akan munculnya koran ini. Pengumuman tersebut pada akhirnya melahirkan kontroversi, karena sejak lima tahun terakhir tidak pernah lagi dikeluarkan SIUPP baru untuk harian umum. Menurut Harmoko, SIUPP baru tidak akan dikeluarkan karena peredarannya sudah jenuh. Namun, berkaitan dengan *Republika*, kata Harmoko, izin dikeluarkan karena ada keputusan dan penilaian positif dari Dewan Pers.⁸

Republika diterbitkan dibawah P.T. Abdi Massa, yang bernaung di bawah Yayasan Abdi Bangsa yang dikenal punya aktivitas menghimpun dana bagi program-program ICMI. Nama-nama di balik Yayasan Abdi Bangsa, antara lain Tien Soeharto, Try Soetrisno, Harmoko, Emil Salim, Ibnu Soetowo, Bob Hasan, Alamsjah Ratuperwiranegara, Nurcholish Madjid, Ali Yafie, Dja'far Assegaff, Rudini, Bustanil Arifin, Sudwikatmono, Probosoetedjo, dan Bambang Trihatmojo. Pelindung: Soeharto. Ketua Pembina: B.J. Habibie. Dua anggota ICMI, sekaligus anggota yayasan, membeli 51% saham P.T. Abdi Massa dan menghibahkannya kepada Yayasan Abdi Bangsa. Menurut *Tempo*, hibah ini agaknya untuk menghindari peraturan Departemen Kehakiman yang menyatakan bahwa yayasan tidak diperkenankan memiliki 20% saham perusahaan di bawah naungannya, 20% saham akan dijual ke koperasi karyawan *Republika*. Ini sesuai dengan ketentuan SIUPP. Sementara, 29% saham akan dijual ke publik dengan harga Rp. 4.000/lembar.

Presiden Soeharto membeli saham *Republika*, namun kata Parni Hadi, dia membelinya sebagai pribadi. Modal awal sebesar 12 miliar rupiah diharapkan terbantu dengan penjualan saham sebanyak 10 juta lembar. Sumber lain mengatakan tak kurang dari 40 miliar rupiah (Lubis dalam Hanazaki, 1998: 130). Dengan jumlah tiras stabil yang pada masa awal diharapkan berjumlah 40.000 eks, manajemen Abdi Bangsa memperkirakan titik impas dalam waktu tiga tahun⁹.

Untuk selanjutnya, harian ini dipimpin oleh Parni Hadi, seorang wartawan senior yang pernah bekerja di Kantor Berita *Antara*, yang menghabiskan banyak waktunya di Jerman. Jajaran redaksinya mencerminkan komposisi intelektual Muslim di Indonesia. Dalam *box name* redaksional *Republika*, tercantum nama-nama tokoh intelektual Muslim sebagai dewan penasehat, seperti Dr. M. Amien Rais (pakar Ilmu politik UGM, ketua PP Muhammadiyah), Dr. Nurcholish Madjid (cendekiawan Muslim, tokoh yayasan Wakaf Paramadina), Dr. Quraish Shihab (Rektor dan Guru Besar Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah), Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo (Pemikir dan aktivis Muslim yang aktif di LSM), Ir. Adi Sasono (Aktivis LSM), Soetjipto Wirosardjono (sebelumnya di BPS, dan Rektor di Universitas Islam As-safi'iyah). Bersama Parni juga terdapat jurnalis profesional Haidar Bagir (pimpinan penerbit Mizan, pemikir Syiah yang aktif), S. Sinansari Ecip (mantan koresponden senior *Tempo*, dosen Universitas Hasanuddin), Nasir Tamara (sebelumnya pernah berkarir di *Tempo*, *Sinar Harapan*, dan *Warta Ekonomi*), Farid Gaban (jurnalis), dan sejumlah wartawan kawakan lainnya. Sekalipun demikian, di antara dewan komisaris yang bertanggung jawab atas modal perusahaan P.T. Abdi Bangsa, terdapat nama Wardiman Joyonegoro, penyokong gagasan pendirian ICMI, sekaligus pendukung Habibie. Wardiman dipilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993. Dengan demikian gejala terakhir ini menunjukkan adanya indikasi bahwa terbitnya koran ini direstui sepenuh hati oleh Soeharto. Bahkan, menurut David Hill (1995:126), awalnya namanya adalah *Republik*, namun oleh Soeharto diganti menjadi *Republika*.

Karena itu, Hill berargumentasi bahwa sekalipun *Republika* terkesan membawa aspirasi mayoritas jurnalis serta intelektual Islam yang liberal dan sekuler dalam mengangkat isu maupun peristiwa, tapi secara ideologis ia menginformasikan nilai-nilai Islam sebagaimana *Kompas* dan *Suara Pembaruan* yang Kristen. Dengan demikian, dalam beberapa hal, *Republika* dapat dikenali sebagai salah satu bentuk pers Islam¹⁰

Tentu saja, pada gilirannya bisa saja muncul keraguan terhadap objektivitas pemberitaan dalam *Republika*. Perihal hal ini, Parni Hadi mengatakan, “Kami akan bersifat profesional sebagaimana halnya koran-koran lain...nafas Islam dalam *Republika* adalah sublim dan subtil”, dan bahwa “... bagaimanapun, karena ini adalah harian umum, kami ingin masyarakat membeli *Republika* karena memang pantas dibaca, bukan karena ikatan primordial” Sedangkan Haidar Bagir mengatakan: “Konteks Islam *Republika* adalah Islam kosmopolitan.”

Namun demikian, klaim tersebut bersifat normatif dan ekspektatif, kenyataannya adalah bahwa ruang redaksi *Republika* sesungguhnya merupakan cerminan dari ICMI itu sendiri. Menurut Hanazaki (1998:131), di *Republika* bekerja para wartawan dengan beberapa kecenderungan. Misalnya, seorang editor – mengutip Schwartz – dijuluki “Pengagum Habibie tanpa Malu”, sementara seorang reporter mengaku secara terbuka bahwa dirinya adalah simpatisan kelompok wartawan pembangkang seperti AJI.

4.2 “Republika” dan Retorika Peran PRD dalam Peristiwa 27 Juli 1996

Bagaimana penggunaan bahasa dalam mencitrakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan pemimpinnya Budiman Sudjatmiko dalam konteks peristiwa 27 Juli 1996¹¹? Ada variasi pandangan di *Republika*: Pertama, PRD dianggap dalang 27 Juli dan kedua, PRD dianggap hanyalah aktor yang dikorbankan.

Berkaitan dengan pandangan pertama, *Republika*, pada 30 Juli 1996, menurunkan laporan bertajuk “Presiden Panggil Enam Pejabat Tinggi, Menkopolikam: PRD Dalangi Kerusuhan PDI”.

Dengan mengutip pernyataan Soesilo Soedarman, Menkopolikam, *Republika* menyatakan bahwa kerusuhan tersebut didalangi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Terminologi “dalang” sesungguhnya meyakini bahwa sekalipun tidak bisa dilihat (dan dengan demikian akan susah untuk dibuktikan), namun bisa diyakini bahwa setiap peristiwa bisa dipastikan ada penggeraknya. Logika ini langsung melompat pada kesimpulan, bahwa penggeraknya adalah PRD. Agar kesimpulan dari logika tersebut absah, maka PRD haruslah ditempatkan dalam konteks trauma Orde Baru. Trauma tersebut adalah “komunis.” Soedarman mengatakan bahwa, “PRD mirip dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebelum 1965”. Soedarman juga berusaha menunjukkan karakteristik yang dimiliki oleh PRD, yang menurutnya sangat mirip dengan PKI. Dengan mengutip pernyataan Soedarman, *Republika* menulis tentang keterkaitan PRD dengan PKI: *PPBI itu mirip dengan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), SMID mirip CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia), selanjutnya STN sama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia), dan Jaker mirip Lekra. SOBSI, CGMI, BTI, dan Lekra adalah underbow PKI sebelum 1965.*¹² Toleransi *Republika* terhadap pernyataan Soedarman, semakin kuat dengan mengutip bahwa: “Kalau dulu (disebut) organisasi tanpa bentuk, sekarang sudah membentuk menjadi PRD.”

Soeharto dalam *Republika*, 8 Agustus 1996, dengan tajuk “Presiden: Cara PRD seperti PKI”, mengatakan:

“(PRD) jelas-jelas telah menggunakan cara berpikir dan bertindak seperti PKI. PRD nyata-nyata merupakan kelompok yang melakukan kegiatan yang bersikap mental makar. Oleh karena itu, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga stabilitas dan ketentraman bersama untuk kesinambungan dan kemajuan pembangunan. Semua itu untuk mewujudkan cita-cita Orde Baru berupa masyarakat yang adil dan makmur berkeadilan sesuai pancasila dan UUD 45”

Selanjutnya, *Republika*, 9 Agustus 1996,

dalam berita bertajuk “Wapres: Anak-anak PRD Keblinger,” mengutip Wapres Try Sutrisno yang mengatakan bahwa aktivis PRD adalah “anak-anak muda keblinger”. Dalam berita ini, *Republika* ingin menunjukkan bahwa Try Sutrisno berusaha menularkan kekhawatirannya kepada publik tentang betapa berbahayanya komunis itu. Komunis dikatakan telah menjadi sejarah kelam bagi kehidupan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak akan mendapat tempat lagi. Partai Komunis dikatakan juga seringkali membawa-bawa nama rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Menyamakan PRD dan PKI sebagai sebangun, sesungguhnya membangkitkan kesadaran akan berbahayanya sebuah organisasi yang telah disusupi dan memiliki ideologi perjuangan komunis. Isu komunisme, dengan demikian, dianggap telah mapan dalam kesadaran publik sebagai sebuah “makhluk” yang menakutkan, karenanya identik dengannya pun menakutkan. Demikian pula dengan menggunakan jargon “organisasi tanpa bentuk”. Jargon ini sebenarnya dapat diasumsikan sebagai “paket siap pakai” yang akan digunakan pada siapa saja yang dianggap mewakili ketakutan pemerintah, dalam hal ini terutama radikal Islam ataupun kelompok kiri.

Pandangan kedua meyakini bahwa PRD bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli. Pandangan ini biasanya mengutip pernyataan dari masyarakat, tokoh LSM, ahli hukum, akademisi, keluarga Budiman, mau pun pihak PRD sendiri.

Republika membangun narasi bahwa tuduhan pihak pemerintah sesungguhnya sangat kontroversial karena sedikit sekali alasan untuk tuduhan tersebut. Misalnya, *Republika* menurunkan tulisan yang berisikan bantahan keluarga Budiman bahwa ia seorang komunis. Dengan berita bertajuk “Orang Tua Budiman Sudjatmiko di Kejagung: Iko Pulanglah, Ibu Kangen,” *Republika* menuliskan bahwa Wartono (ayah Budiman) meragukan pernyataan bahwa anaknya menganut paham komunisme atau terlibat kegiatan PKI. Menurut Wartono, *kakek Budiman adalah pejuang Hisbullah*. Sehingga tidak

mungkin Budiman terlibat kegiatan berhaluan kiri. “Saya pribadi sangat benci PKI,” kata Wartono. Menurut Ibunya, Sri Sulastri, Budiman adalah anak saleh. Ketaatan dalam menjalankan agama ataupun semangat religius seringkali menjadi pintu masuk yang efektif untuk menanamkan keyakinan bahwa Budiman tidak mungkin “terjangkit” komunis. Tidak ada dimensi yang paling ditakuti dari komunis dalam bayangan rakyat biasa, selain citra paham ini yang sangat anti-agama. Dengan demikian membangun gagasan bahwa seorang yang religius sudah pasti anti-komunis akan segera menghentikan perdebatan.

Demikian juga dengan pernyataan Budiman, yang juga merupakan judul berita *Republika*, “Budiman Menyanggah, Kami Bukan Ateis.” Berkaitan dengan soal agama, PRD tidak menolaknya, hanya tidak berkenan dengan digunakannya agama sebagai alat politik. Agama layaknya diempatkan sebagai penjaga moral etik dan spiritual. Karena itu, menurut Budiman, PRD bukan atheist. Dengan demikian, apabila komunis dalam bayangan pemerintah Orde Baru adalah citra politiknya yang merupakan sejarah kelam masa lalu, *Republika* membangun citra bahwa soal komunis adalah soal apakah seseorang itu beragama atau anti-agama. Sebagai sebuah media Muslim, *Republika* ingin menanamkan keyakinan dari dimensi ini, bahwa Budiman bukanlah komunis karena dia sangat religius, yang kakeknya adalah laskar Hisbullah yang melawan komunis, dan ayahnya sangat benci PKI.

Republika juga mengkritisi proses peradilan yang dilakukan atas diri Budiman. Tampak dengan jelas bahwa *Republika* sangat “royal” menyajikan pernyataan-pernyataan dari para penasihat hukum Budiman, maupun pernyataan Budiman sendiri. Simak saja kritikan penasihat hukum Budiman ketika mengkritik dakwaan jaksa terhadap Budiman: “Tidak ada niat anak-anak itu untuk menggulingkan pemerintah.” Luhut Pangaribuan menilai bahwa mereka adalah anak-anak muda yang kritis dan kreatif yang ingin menyumbangkan pikirannya bagi bangsa dan negara. Luhut menolak penggunaan Manifesto Politik PRD sebagai bahan acuan. Menurutnya, “manifesto itu buah pikiran.

Dan pikiran tidak bisa diadili”.

Demikian juga dengan pernyataan Abdul Hakim Garuda Nusantara yang berpendapat bahwa Budiman harus dibebaskan karena yang dituduhkan kepadanya ketika ditangkap tidak terbukti. Menurutnya, tidak beralasan apabila karena tidak terbukti kemudian dakwaannya diganti. Baginya, dengan keadaan tersebut, berarti kekuasaan telah bertindak semaunya.

“Masa orang dituduh dan tidak terbukti, lalu dituduh untuk tindakan yang lain lagi... apalagi terdakwanya tidak diberitahu.”

Republika juga cukup berani menggambarkan pandangan Budiman atas proses peradilan yang dijalannya. Menurut *Republika*, Budiman merasa diperlakukan tidak adil karena dalam pemeriksaan, ia tidak ditanyakan perihal kasus 27 Juli, tetapi sebagian besar berkaitan dengan Manifesto PRD. Menurutnya, kasus 27 Juli sekadar ‘tempelan’ saja. Sekadar mencari momentum. *Republika* menyajikan kata-kata Budiman, yaitu:

Menurut saya, pertanyaan ini sudah mengaduk-aduk. Air yang bersih saja bila diaduk-aduk akan kotor sementara tangan yang mengaduk-aduk jadi bersih. Saya tak mau diperlakukan seperti itu.....Saya didakwa dan dipersangkakan atas perbuatan apa? Dan itu tidak dijawab.”

4.3 Resistensi “Republika”: Relasi Teks, Respons, dan Histori

Bagaimana reaksi kalangan Islam? Konteks apa yang bisa diidentifikasi yang melahirkan teks tersebut? Laporan Hefner (2001:311-313) mengidentifikasi begitu beragamnya reaksi dari kalangan Islam terhadap kasus ini. Di kalangan ICMI, Nurcholish Madjid, misalnya, menolak klaim tersebut. Nurcholish menegaskan bahwa tuduhan komunis-subversi adalah “bahasa lama” guna menyembunyikan kasus 27 Juli yang sebenarnya; yaitu terhambatnya saluran-saluran politik resmi yang telah *diblokir* oleh negara. Nurcholish mendesak umat Islam dan kalangan demokrat lainnya untuk tetap tenang, sembari terus memikirkan strategi jangka panjang guna mewujudkan *civil society* yang kuat untuk menandingi kekuatan negara. Di lain pihak, Ketua

Muhammadiyah, Amien Rais, mendukung tuduhan pemerintah bahwa orang-orang komunis berada di balik kerusuhan 27 Juli ¹³. Ketua PB NU menyatakan keraguannya, namun alih-alih menuduh pemerintah telah berbohong, NU justru menuntut pemerintah agar membuktikan (tuduhan)nya. Selain itu, kelompok ultrakonservatif Islam bahkan lebih mendukung langkah-langkah pemerintah. Ahmad Sumargono, Ketua KISDI, menyatakan keyakinannya bahwa PKI-lah yang berada di belakang kasus 27 Juli, karena kekerasan merupakan cara-cara PKI. Hussein Umar dari DDII juga berpendapat sama, dengan mengatakan bahwa taktik-taktik PKI adalah penyusupan, gerakan bawah tanah, perang psikologis, sabotase, dan penyerangan. Semua itu adalah doktrin PKI ¹⁴.

Bagaimana respon *Republika*? Terdapat variasi respons yang muncul. Salah satu respons dikemukakan redaktur *Republika*, A.E. Priyono (“PRD: Varian Revolusioner Marxisme-Politik”, Suplemen *Tekad*, *Republika*, 5 Agustus 1996). Menurutnya, PRD memang membawa bendera komunis. Dengan menganalisis manifesto PRD yang ditemukan polisi, Priyono berargumentasi bahwa tindakan pemerintah melakukan penangkapan terhadap aktivis PRD memiliki alasan kuat dan absah dengan tujuan pembersihan terhadap gerakan-gerakan kiri. Tindakan ini didasarkan atas bukti dokumen-dokumen yang ditemukan. Baginya, PRD telah jatuh dalam retorika Leninis. Pandangan-pandangan Leninis tampak sekali dalam tesis-tesis PRD mengenai: (1) peranan partai; dan (2) keinginannya untuk menciptakan gerakan revolusioner berbasis massa. Menurut Priyono, hampir sepanjang retorikanya mengenai perjuangan untuk membangun “koalisi demokratik kerakyatan”, PRD melihat peranannya “lebih dari sekadar berdiri di atas gerakan spontan massa”, tetapi lebih dari itu: sebagai “pemasok kesadaran progresif massa.” Peranan partai seperti itu dimaksudkan untuk membebaskan rakyat dari “kesadaran palsu”-nya dan memimpin perubahan radikal untuk mendirikan negara koalisi demokratik kerakyatan. PRD juga percaya—meski diselimuti retorika demokratis yang membingungkan—bahwa “perjuangan bersenjata adalah kebutuhan nyata

massa dan merupakan kulminasi dari situasi revolusioner perlawanan rakyat.” Tapi anehnya, PRD mengklaim akan tunduk pada prinsip “pluralisme demokratik,” dan berjuang meningkatkan gerakan kualitatif rakyat menuju suatu masyarakat demokratik multi partai kerakyatan yang damai, tanpa kekerasan. Ini adalah kontradiksi-kontradiksi tersembunyi PRD.

Namun, terdapat respons yang berbeda atas isu bahwa PRD terlibat dalam peristiwa 27 Juli dan memiliki ideologi komunis. Eep Saefulloh Fatah (“27 Juli dan Tragedi *Civil Society*”, *Republika* 21 September 1996), ketua litbang *Republika*, berargumentasi bahwa, peristiwa 27 Juli sesungguhnya merepresentasikan perjumpaan negara dengan masyarakat sipil. Menurutnya, ini merupakan sebuah ‘tragedi.’ Mengapa? Karena masyarakat terlambat prematur untuk mendesakkan demokratisasi secara efektif. Bagi Fatah, peristiwa tersebut adalah bentuk radikalisme masyarakat, yang sebagai jalan menuju demokrasi, adalah tindakan bunuh diri. Karena, ketika radikalisme itu muncul, maka ia tinggal menunggu ditumpas oleh radikalisme negara dengan sangat efektif.

Selain itu, bagi Fatah, tragedi ini justru mengurangi posisi moral gerakan prodemokrasi dari luar negara. Radikalisme pada peristiwa itu malah melipatgandakan legitimasi negara untuk mengendalikan proses sosial dan politik masyarakat. Akibatnya adalah sbb. *Pertama*, terancamnya penguatan dan kristalisasi kekuatan oposisi politik. *Kedua*, aliansi dan realiansi kelompok prodemokrasi yang bersifat lintas ideologi menjadi berantakan. Berkaitan dengan hal ini, Fatah mengatakan rusaknya proyek ini karena masuknya, atau setidaknya dianggap masuknya wacana komunisme. *Ketiga*, terpenggalnya gejala formalisasi oposisi politik melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI). *Terakhir*, proyek-proyek perluasan dan redefinisi hak-hak politik individual dan masyarakat yang sudah bergulir semenjak tujuh tahun terakhir mengalami langkah mundur. Tragedi 27 Juli memberikan legitimasi kepada negara untuk mengetatkan kembali regulasi politik masyarakat.

Kesimpulan yang bisa diambil dari keterangan ini adalah, bahwa Fatah meyakini Orde Baru sebagai rezim yang otoriter, dan bahwa radikalasi dalam peristiwa 27 Juli merupakan gerakan perlawanan rakyat atas otoritarianisme Orde Baru. Sekalipun, menurutnya, hal itu adalah radikalasi bunuh diri mengingat begitu kuatnya negara, yang tentu saja akan menghadapinya dengan radikalisme efektif guna menumpas radikalisme masyarakat. Fatah juga tidak begitu yakin bahwa wacana komunisme yang diintroduksir pemerintah secara faktual ada. Menurutnya, bisa jadi itu “hanya dianggap ada.”

Sejalan dengan Fatah, Hersubeno Arif (“Mimpi *People Power* dan Ketaksabaran Anak Muda”, 5 Agustus 1996, suplemen *Tekad, Republika*) Redaktur *Republika*, menulis bahwa letak persoalannya adalah apakah dengan menuduh PRD sebagai biang kemelut di PDI maka dapat menjelaskan fenomena politik yang terjadi? Hersubeno mengutip pandangan banyak pengamat bahwa terdapat banyak kelompok yang secara diam-diam mendukung Megawati. Selain PRD, tercatat puluhan LSM dan berbagai gerakan yang tergabung dalam Majelis Rakyat Indonesia (MARI), dan Abdurrahman Wahid sebagai pribadi. Bagi Hersubeno, semua ini tidak akan berakhir hanya dengan menuduh sekelompok anak muda yang bergabung di PRD. Baginya, soalnya adalah, siapa menunggangi siapa?

Sikap Hersubeno mengamini pandangan Fatah, yang percaya bahwa tuduhan pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat, dan terkesan dibuat-buat. PRD diyakini bukanlah kelompok di balik kerusuhan tersebut, namun merupakan bagian dari aliansi atas sejumlah kelompok dari berbagai golongan yang merupakan kekuatan rakyat dengan agenda yang sama: mengoreksi pemerintahan yang berkuasa.

Pemberitaan *Republika* perihal citra Partai Rakyat Demokratik dalam peristiwa 27 Juli 1996, menyiratkan argumentasi. Apabila disimpulkan hingga proses peradilan yang mendakwa pihak-pihak yang dituduh terlibat 27 Juli, nyata sekali *Republika* meyakini bahwa Peristiwa 27 Juli adalah peristiwa masuknya campur tangan pemerintah

dalam konflik PDI. PRD dan para pimpinannya hanyalah kambing hitam yang dipersalahkan pemerintah. PRD bukanlah komunis. Mereka hanyalah anak-anak muda yang menginginkan perubahan. Ketika membangun gagasannya, *Republika* selain mengutip sumber-sumber pemerintah, juga mengutip pandangan dan kekecewaan pihak masyarakat, tokoh LSM, ahli hukum, akademisi, keluarga Budiman dan pihak PRD sendiri. Sumber-sumber yang pertama meyakini bahwa PRD adalah dalang dari kerusuhan tersebut. Sedangkan sumber-sumber kedua meyakini bahwa PRD hanyalah aktor yang dikorbankan.

Kedua pandangan ini menjadi relevan dalam kajian ini apabila ditempatkan pada konteks historis Orde Baru. Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat telah mulai melakukan proses-proses delegitimasi dalam tingkat wacana, ataupun dalam tingkat yang tidak bisa dikatakan remeh, berupa gerakan-gerakan yang mengarah pada penolakan rezim. Peristiwa ini sendiri merupakan representasi perlawanan masyarakat yang menobatkan Megawati sebagai simbolnya. Belakangan disadari bahwa kelompok-kelompok yang mendukung Megawati sangatlah beragam. Artinya, menguatnya atau masuknya masyarakat lebih jauh lagi dalam wilayah politik, yang sebelumnya didominasi negara menunjukkan kian lemahnya negara. Pers Indonesia, tentu saja, sangat menyadari kondisi ini. Demikian pula dengan *Republika*. Melemahnya peran negara, dan kuatnya desakan masyarakat bagi demokratisasi, telah ikut menguatkan faksi independen dalam ICMI, sekaligus melemahkan faksi rezimis. Para intelektual independen yang sebelumnya menempatkan *Republika* sebagai medium artikulasinya, semakin menguatkan tendensi tersebut. Jadi, apabila diamati, sekalipun terdapat variasi pandangan yang mengikuti perspektif pemerintah, namun dengan menempatkan perspektif versi “lawan” pemerintah, telah menunjukkan bahwa *Republika* “mencoba” untuk bersikap “objektif.” Apabila menggunakan penafsiran minimal, maka bisa disimpulkan bahwa *Republika* meyakini kalau versi “lawan” juga

memiliki peluang benar. Namun, apabila menggunakan versi maksimal, maka *Republika* disimpulkan meyakini bahwa isu komunis merupakan isu yang dibuat-buat, yang seringkali digunakan sebagai “paket tudingan” bagi siapa saja yang tidak direstui pemerintah. Eep Saefulloh Fatah, Litbang *Republika*, mengatakan bahwa isu komunis adalah sesuatu yang bisa saja “dianggap ada,” sedangkan Hersubeno Arif, redaktur *Republika*, meyakini bahwa memandang PRD sebagai dalang kerusuhan tidak akan menyelesaikan persoalan karena mengabaikan fakta begitu beragamnya kelompok yang mendukung Megawati. Selain itu, versi pandangan yang meng-“amini” versi pemerintah berusaha mengambil kesimpulan semata-mata mendasarkan diri dengan mengotak-atik manifesto PRD—sesuatu yang juga dilakukan oleh para jaksa penuntut.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa teks pemberitaan *Republika* menerapkan strategi perlawanan teks terhadap upaya pendefinisian realitas oleh rezim Orde Baru. Strategi perlawanan dalam teks pemberitaan konsisten dengan respon yang “diartikulasikan” awak jurnalis *Republika*, terutama lewat munculnya pandangan yang delegitimatif terhadap retorika pemerintah dalam mendefinisikan Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang kerusuhan. Respon delegitimatif yang memunculkan strategi perlawanan dalam teks pemberitaan disebabkan oleh kecenderungan konteks historis yang menunjukkan melemahnya peran negara. Dalam konteks relasi Islam dan negara, melemahnya peran negara dan kuatnya desakan masyarakat bagi demokratisasi menguatkan faksi independen dan melemahkan faksi rezimis dalam ICMI. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi para aktivis media di *Republika*.

Catatan Akhir

¹ Ulasan perihal seputar peristiwa 27 Juli sebagian besar bersandar pada laporan Hefner (2001:308-315)

- ² Pemuda Pancasila adalah organisasi pemuda yang berafiliasi pada Golkar. Didirikan pada tahun 1980-an oleh aparat keamanan. Kebanyakan anggotanya direkrut dari para preman dan kriminal.
- ⁴ Hal yang menarik dalam laporan Hefner (2001:311) adalah bahwa para pengamat di Jakarta mengarahkan tuduhannya pada Adi Sasono dari CIDES ICMI. Namun Adi Sasono menolak tuduhan tersebut. Akan tetapi, perlu dicatat, bahwa meski Adi mengkritik PRD karena kekiri-kirianya yang naif, ia menolak bergabung dalam gerakan mengutuk PRD. Karena, menurutnya, mengutuk PRD berarti mengabaikan masalah yang lebih besar dari masalah PRD.
- ⁵ Salah satu riset yang secara eksplisit menggunakan metode ini adalah Abar (1995a)
- ⁶ Formulasi pandangan-pandangan Hefner ini bersandar pada pembagian proposisi yang dibuat oleh Liddle (1997:73-75.) ketika menganalisis pandangan-pandangan Hefner.
- ⁷ Di antara kategori santri dan abangan, Geertz juga menyelipkan kategori priyayi. Trikotomi ini ditolak, misalnya oleh Harsya Bachtiar. Karena kategori abangan dan santri merupakan kategori tingkat keberagaman, sedangkan kategori priyayi lebih tepat disandingkan dengan *wong cilik* yang berguna untuk mengukur stratifaksi sosial. Lihat Rahardjo (1991:4)
- ⁸ Tempo, 9 Januari 1993: 33
- ⁹ Tempo, Ibid
- ¹⁰ Istilah Pers Islam mengacu pada karakteristik yang melekat pada *Republika*, yang penulis anggap sebagai representasi dari pers (media) Islam. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai alasan untuk menggunakan istilah ini terhadap *Republika* adalah: *Pertama*, alasan historis, *Republika* didirikan oleh ICMI lewat Yayasan Abdi Bangsa. ICMI sendiri merupakan wilayah dimana kelompok-kelompok Islam berkumpul dengan ekspektasi agar Islam menjadi mainstream dan bukan marjinal. Berdirinya *Republika* — yang disponsori ICMI itu — tentu saja juga mewakili semangat itu. *Kedua*, sebagian besar pengelolanya adalah muslim. Alasan ini tentu saja cukup ‘cair’, karena nampak gegabah untuk mengatakan bahwa setiap muslim akan berjuang demi kepentingan Islam. Namun, cukup masuk akal apabila dikaitkan dengan basis sosial *Republika* yang merupakan kelas menengah Islam yang cukup terpelajar dan urban. Mengelola sebuah media Islam yang cukup besar, tentu saja tidak semata hanya harus dibekali profesionalitas, namun pemahaman yang memadai tentang Islam itu sendiri. Sekalipun alasan ini juga masih cukup abstrak, namun terlihat konkret apabila dikaitkan dengan semangat awal berdirinya *Republika*. Tegasnya, sebagian besar jurnalis Muslim profesional di *Republika* diasumsikan memahami

Islam dengan cukup memadai.

Ketiga, *Republika* ditujukan untuk pembaca Muslim. Indikasinya adalah beberapa content Republikamenggunakan istilah-istilah yang hanya akan dapat dipahami dengan baik oleh sebagian besar Muslim ataupun rubrik yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Muslim. Misalnya terdapat rubrik bertajuk *Hikmah* yang kerap berisi dimensi-dimensi ajaran Islam, atau terdapat rubrik yang khusus berkaitan dengan ekonomi Islam yang bertajuk “Ekonomi dan Bisnis Syariah” melengkapi halaman lain yang rubriknya bertajuk “Ekonomi dan Bisnis”. *Republika* bagi penerbitan wilayah Jawa Barat, misalnya, diberi nama Kalam. Secara eksplisit Parni Hadi menyebutkan bahwa yang membuat *Republika* berbeda dengan koran lain adalah bahwa *Republika* bernaaskan Islam dalam menjalankan misinya. Lihat Hadi (1995: 277); *Buklet Republika: Koran Komunitas Islam*, P.T. Abdi Bangsa Tbk, tanpa tempat dan tahun penerbitan.

¹¹ Untuk selanjutnya, chaos 27 Juli 1996 disingkat atau diistilahkan dengan 27 Juli saja—*peny*.

¹² PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), STN (Serikat tani Nasional), & Jaker (Jaringan Kerja Kesenian Rakyat) adalah organisasi-organisasi di bawah PRD.

¹³ Menurut Hefner (2001:312), sekalipun Muhammadiyah di bawah Amien Rais punya komitmen terhadap gerakan demokratisasi, namun Muhammadiyah tetap sangat antikomunis dan merasa alergi dengan hal-hal yang “berbau kiri”. Sebenarnya orang-orang Muhammadiyah paham bahwa pemerintah yang merekayasa penyerangan terhadap PDI, namun tidak sedikit juga yang percaya bahwa tuduhan pemerintah bahwa PDI Mega telah diinfiltasi kelompok kiri. Hal yang juga patut dipertimbangkan adalah peristiwa-peristiwa yang mengikuti peristiwa 27 Juli. Dua minggu setelah kerusuhan 27 Juli, tepatnya 11 Agustus 1996, sekitar 40.000 umat Islam berkumpul di Stadion Utama Senayan Jakarta untuk mendukung klaim pemerintah bahwa PRD dan orang-orang komunis adalah pengasas kasus 27 Juli. Menurut Hefner (2001:313), terdapat logika politik yang membuat umat Islam menunjukkan kekuatannya itu. Pada minggu-minggu setelah kerusuhan 27 Juli, pemerintah menekan tokoh-tokoh umat Islam untuk mengutuk PRD dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi yang menolak akan dijadikan sasaran serangan pemerintah. Mereka dipersulit mendapat izin untuk menyelenggarakan pertemuan terbuka, kader-kader organisasi yang menolak juga “digaruk” aparat untuk diinterogasi, dan bisnis-bisnis pendukungnya terancam kehilangan kontrak-kontraknya. Menghadapi represi seperti ini, umumnya organisasi-organisasi Islam patuh pada permintaan pemerintah.

¹⁴ Majalah *Media Dakwah* dari DDII edisi Agustus 1996 mengangkat masalah ini. Gambar sampul itu adalah setan gundul (PKI) menunggangi lambang PDI, di atasnya tertulis: "Siapa di Belakang Setan Gundul ?" *Media Dakwah* edisi September memuat lebih lengkap analisis provokatif tentang kasus 27 Juli. Gambar sampulnya adalah palu arit yang diatasnya tertulis kata-kata: "Menumpas Orang-orang Komunis: Orang Islam yang Pertama Kali akan Melawan PKI". Namun demikian banyak tokoh muda DDII yang merasa terganggu atau kurang senang dengan dirangkulnya organisasi mereka oleh rezim (Hefner, 2001:313).

Daftar Pustaka

- Abar, Ahmad Zaini. 1995. *Kisah Pers Indonesia: 1966-1974*. Yogyakarta: LkiS.
- Anwar, M. Syaifi'i. "Islam, Negara, dan Formasi Sosial dalam Orde Baru: Menguak Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI", (Suplemen) *Ulumul Qur'an* No. 3, 1992
- Arif, Hersubeno, "Mimpi People Power dan Ketaksabarannya Anak Muda", (Suplemen Tekad), *Republika* 5 Agustus 1996.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fatah, Eep Saefulloh, "27 Juli dan Tragedi Civil Society". *Republika*, 21 September 1996.
- Hadi, Parni, "ICMI dan Kehidupan Pers di Indonesia", dalam Tamsil Linrung, et.al, (ed.), 1995. *ICMI: Beberapa Catatan Kritis*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara.
- Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Jakarta: ISAI.
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Hill, David T. 1995. *The Press in New Order*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Liddle, R. William, 1997. "Giliran Islam di Dalam Politik Indonesia: Sebuah Penjelasan Berpusat-Negara", dalam Islam, Politik, dan Modernisasi. Jakarta: Sinar Harapan.
- Priyono, A.E. "PRD: Varian Revolusioner Marxisme-Politik" (Suplemen Tekad), *Republika*, 5 Agustus 1996.
- Rahardjo, M. Dawam, "Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru", *Prisma*, No. 3, 1991.
- Ramage, Douglas E. 2002. *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Republika: Koran Komunitas Islam*, (Leaflet) P.T. Abdi Bangsa Tbk .
- TEMPO*, 9 Januari 1993

